

Evaluasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pada Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi

Aisyah Nur Fazri

222020100091

Dosen Pembimbing :

Isna Ftria Agustina, S.sos., M.si.

Program Studi Administrasi Publik
Univesitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026

Pendahuluan

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut pada prinsip desentralisasi, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan berbagai urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, termasuk desa. Indrajit (2016) berpendapat bahwa desentralisasi memberikan kesempatan bagi unit terkecil pemerintahan untuk mengelola sumber daya secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Oleh karena itu desa memainkan peran penting dalam memelihara, mengelola, dan mengembangkan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aset desa merupakan sumber daya penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 mengeluarkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk membantu dalam mengelola aset desa.



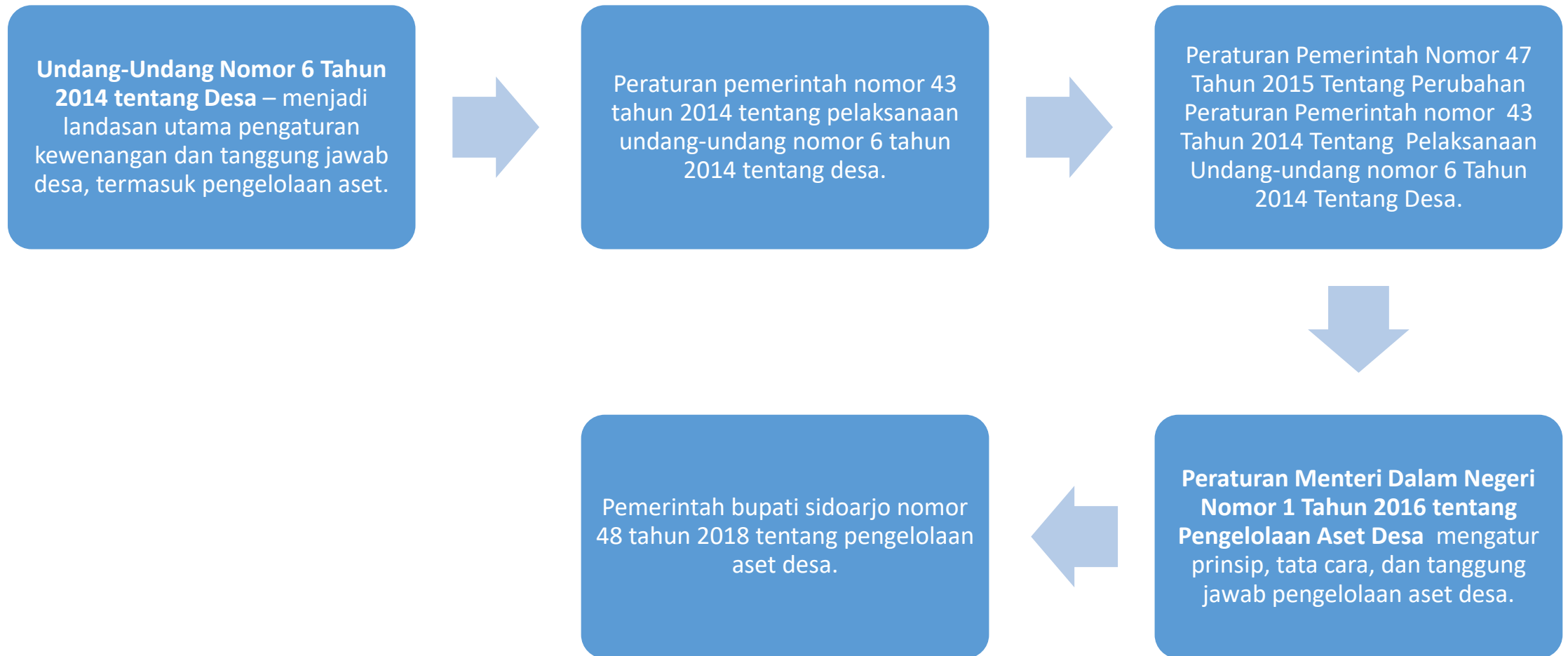
Pengelolaan aset desa menjadi penting karena aset desa merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Dengan adanya SIPADES ini sejalan dengan konsep *E-government* dengan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pengelolaan aset desa ini dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pamungkas, 2022). Harapan pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dalam meluncurkan aplikasi SIPADES dimaksud agar pemerintah desa dapat melakukan inventarisasi aset lebih mudah, cepat, dan tertib dari yang sebelumnya.



Pendahuluan

- Dasar hukum



Gap Permasalahan

Kondisi ideal:

SIPADES dapat mempermudah adanya inventarisasi aset yang ada di desa. Adanya pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan pada setiap pembaharuan aplikasi



Kondisi nyatan:

Implementasi yang belum optimal diberbagai daerah, termasuk Desa Larangan, Kecamatan Candi. Kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi. Adanya kendala pada sistem sehingga mengalami error yang tidak dapat diakses, terutama setelah adanya pembaharuan versi 2.0 ke 3.0.

Tujuan penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan SIPADES pada pemerintah desa, seberapa efektif dan efisien. Dalam melakukan inventarisasi aset yang ada di desa secara digital.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024), dengan judul “*Village Asset Management Innovations Through Application-Based Systems*” dengan hasil temuan lebih berfokus pada identifikasi hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi SIPADES seperti kurangnya keterampilan pengurus desa, permasalahan teknis aplikasi, dan minimnya pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto & Indriane, M. (2023) berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang” penelitian ini menggunakan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi). Dengan hasil temuan kurangnya bimbingan teknis yang menyebabkan rendahnya kapabilitas aparatur desa.

Penelitian yang ketiga, yang dilakukan oleh M. R. Q., & Raharso, M. (2020) berjudul “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)” ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami perangkat Desa dalam penggunaan aplikasi SIPADES seperti sistem yang sering error, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan SIPADES, serta tidak ada pendampingan berkelanjutan jika perangkat Desa menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi.

Penelitian yang keempat, yang dilakukan oleh wawan (2021) dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)”. Hasil temuan penelitian ini ialah minimnya pelatihan dan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aplikasi SIPADES

Dalam penelitian yang dijelaskan oleh Nur

Haliza, S., & Agustina, I. F. (2024) dengan judul “Quality of Population Administration Services Through Online

Service (Plavon) in Realizing E-Government” menjelaskan bahwa E-Government yang dikembangkan dengan tujuan

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perkembangan teknologi yang ada

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif



Sumber data

Data primer dan data sekunder



Lokasi penelitian

Pemerintah desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo



Teknik pengumpulan data

Melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi



Teknik analisis data

Menggunakan model analisis interaktif miles & huberman (1994) yang terdiri dari 4 tahapan:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan



Fokus penelitian

Berfokus pada evaluasi penerapan SIPADES menggunakan teori evaluasi kebijakan William N.Dunn. Yang berfokus pada 5 indikator:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Kesetaraan
5. Responsivitas

Hasil & Pembahasan

Indikator pertama, yakni EFEKTIVITAS

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Dalam implemtasi kebijakan, efektivitas ini berkaitan dengan apakah suatu program dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan mementingkan tujuannya. Jika hasilnya mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap evektifitas ini ditunjukan untuk menjawab ketepatan penerapan dari program atau kebijakan.

“Aplikasi tidak dapat dibuka saat tahun 2024 awal, sehingga membuat input data aset desa menjadi terhambat. Apalagi saat terjadi pembaharuan 3.0 yang ini sehingga kita sebagai operator aplikasi tidak dapat melakukan apapun” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Keterbatasan akses setelah pembaruan menyebabkan fungsi utama aplikasi, khususnya dalam proses input data, tidak dapat dijalankan secara optimal. Alih-alih meningkatkan efisiensi, pembaharuan ini justru menimbulkan hambatan sama seperti versi sebelumnya baik itu versi 1.0 dan versi 2.0 pembaharuan ini justru menimbulkan hambatan baru karena aplikasi tidak dapat diakses. Menurut teori william N. Dunn, hal ini menunjukan rendahnya tingkat efektivitas, sebab program tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan mempermudah pengelolaan aset desa.

Hasil & Pembahasan

Indikator yang kedua, yakni EFISIENSI

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara input dan output, yaitu sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan hasil yang optimal (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaannya SIPADES, ini memang memberikan kemudahan dalam pencatatan aset secara daring. namun pada kenyataannya, metode manual masih diperlukan hal ini merupakan tahapan yang saling mendukung agar data yang dimasukkan ke sistem lebih lengkap dan akurat.

“Aplikasi SIPADES ini sangat menguntungkan sekali, namun sayangnya dalam pengoperasiannya masih harus menunggu adanya konfirmasi dari pusat untuk dapat mengakesenya. Input data jadi terkendala, apalagi kalau kita masih belum melakukan pengukuran pada tanah, green house yang sedang kami kembangkan jadinya memerlukan 2 kali tahapan dalam melakukan rekap data untuk selanjutnya akan kami unggah dalam aplikasi SIPADES” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Kendala lainnya adalah SIPADES tidak mempunyai sistem backup data, sehingga pendataan manual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan ini proses pengelolaan aset desa justru menambah waktu dan tenaga, sehingga mengurangi efisiensi. Menurut Dunn, kebijakan dikatakan efisien jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya atau usaha yang dikeluarkan. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi SIPADES masih rendah. Oleh karena itu, SIPADES di Desa Larangan belum menunjukkan efisiensi yang optimal, karena manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dapat mengurangi waktu dan beban kerja perangkat desa.

Hasil & Pembahasan

Berikut merupakan salah satu daftar aset desa larangan yang berupa jalan irigasi

No	Nama barang	Kode barang	NUP	Ukuran (M ²)	Tahun perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Jl. Merpati	-	-	269 M ²	-	-	Jl. Merpati
2.	Jl. Kepodang	-	-	273 M ²	-	-	Jl. Kepodang
3.	Jl. Kutilang	-	-	391 M ²	-	-	Jl. Kutilang
4.	Jl. Cendrawasi	-	-	86 M ²	2023	Rp. 29.700.000	Jl. Desa
5.	Jl. Musholah Al-Amanah	-	-	100 M ²	2023	Rp. 15.256.000	Jl. Desa
6.	Gg. Muria	-	-	88 M ²	-	-	Jl. Cendarawasi rt 05 rw 02

Sumber : Keputusan Kepala Desa Larangan, Nomor 87 Tahun 2024

Hasil & Pembahasan

Indikator yang ketiga, yakni KECUKUPAN

Secara ideal SIPADES ini memang dirancang untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan aset desa secara menyeluruh. Namun, pada implementasinya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan aset, khususnya di Desa Larangan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala teknis serius, yaitu aplikasi tidak dapat diakses sama sekali. Akibatnya, proses penginputan data aset desa tidak berjalan optimal, dan sebagian besar pencatatan masih harus dilakukan secara manual dengan menuliskannya di buku.

“Ya gimana, aplikasi ngga dapat kami akses untuk saat ini jadinya ya otomatis dan harus kami lakukan secara manual dengan menuliskannya di buku. Padahal aplikasi SIPADES ini sangat menguntungkan sekali sebetulnya, namun sayangnya aplikasinya sekarang hanya sebuah pajangan saja karena tidak dapat kami akses dengan baik” (Wawancara, 20 Agustus 2025).

Dalam teori Dunn, kecukupan ini menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mengatasi masalah. Seluruh perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai penggunaan SIPADES dan aplikasi lainnya yang mendukung proses pencatatan. Berdasarkan indikator kecukupan, SIPADES di Desa Larangan belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan aset secara optimal, karena keberlangsungan pengelolaan masih sangat bergantung pada pencatatan manual dan belum didukung oleh akses sistem serta penguatan kapasitas pengguna secara berkelanjutan.

Hasil & Pembahasan

Indikator yang ke empat, yakni KESETARAAN

Kesetaraan ini berkaitan dengan apakah aplikasi SIPADES membawa manfaat nyata bagi perangkat desa dan para pemangku kepentingan dalam mempermudah proses penyimpanan serta pengelolaan data aset desa agar lebih tertib dan efisien. Secara teknis, aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh perangkat desa, namun dalam praktiknya, hanya segelintir orang yang benar-benar mengoperasikannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Pelatihan untuk aplikasi ini hanya dilakukan 2 atau 3 kali yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dan kami masih menunggu adanya pelatihan lanjutan lagi, terutama untuk SIPADES yang 3.0 ini” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Sehingga kondisi ini menunjukkan lemahnya aspek kesetaraan, karena akses dan kapasitas penggunaan aplikasi tidak merata ke semua perangkat desa. Dengan demikian, berdasarkan indikator kesetaraan, SIPADES di Desa Larangan belum sepenuhnya memenuhi aspek pemerataan kapasitas penggunaan, karena pengetahuan dan kemampuan teknis masih terpusat pada operator tertentu serta belum didukung dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Hasil & Pembahasan

Indikator yang kelima, yakni RESPONSIVITAS

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan perangkat desa terhadap SIPADES cukup tinggi karena aplikasi dapat membantu mengintegrasikan data hasil pencatatan lapangan dengan pengelolaan data secara digital. Meskipun aplikasi sangat membantu, terdapat tantangan teknis seperti error saat mengoperasikan aplikasi dan batasan ukuran file saat mengunggah dokumen, yang kadang mengharuskan perangkat desa melakukan kompresi file sehingga kualitas data menjadi kurang optimal.

“Ya harapan kami untuk SIPADES ini dapat digunakan kembali agar kami juga mempunyai backup data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Ya meskipun harus kerja dua kali dengan metode manual dan harus meninputnya lagi di aplikasi.” (wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama pengguna bukan hanya keberadaan aplikasi, tetapi keberfungsian sistem yang dapat digunakan secara konsisten sebagai sarana pengelolaan dan penyimpanan data aset. Oleh karena itu, berdasarkan indikator responsivitas, SIPADES di Desa Larangan belum mampu merespons kebutuhan perangkat desa secara optimal, khususnya dalam hal ketersediaan akses, kestabilan sistem, dan dukungan teknis.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi SIPADES masih belum cukup mampu berjalan dengan optimal karena aplikasi yang tidak dapat dibuka sejak awal tahun 2024. Sehingga hal ini berdampak pada rendahnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan responsivitas dalam pengelolaan aset desa. Meskipun aplikasi dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun pada praktiknya dilapangan menyebabkan seluruh proses pengelolaan aset tetap dilakukan secara manual, yang berimbas pada rendahnya efisiensi dan responsivitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup jumlah informan yang terbataas hanya pada perangkat desa yang berperan langsung dalam menggunakan aplikasi SIPADES. Karena hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta tidak adanya tindak lanjut teknis dari pihak pengembang SIPADES turut memperburuk kondisi ini. Meskipun aplikasi SIPADES dirancang untuk mendukung prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor kesiapan infrastruktur, kompetensi pengguna, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian untuk membandingkan implementasi SIPADES pasca update 3.0 diberbagai konteks. Serta dapat menyoroti aspek kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengembangan aplikasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan desa.

Referensi

1. R. E. Indrajit, “Konsep dan Strategi Electronic Government,” *Electron. Gov.*, vol. 84, pp. 1–166, 2016, [Online]. Available: https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
2. R. Primananda, “Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan,” *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 4, no. 03, pp. 212–218, 2024.
3. A. Hartiningtyas and Ii. Choiriyah, Usrotin, “IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM,” vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024.
4. L. T. Pamungkas *et al.*, “Desa (Pad) Di Desa Ngebel , Kecamatan Ngebel , Kabupaten,” 2022.
5. L. N. Hidayah *et al.*, “Pengolahan Data Aset Desa Di Latukan Dengan,” vol. 3, no. 2, 2022.
6. U. A. A. Wawan, “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,” *Sebi Stud. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 91–98, 2021, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
7. R. R. Nurdianti, E. E. Sasanti, and I. P. Lenap, “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 784–792, 2022, doi: 10.29303/risma.v2i4.338.
8. M. S. Maarif and H. Sukmana, “Village Asset Management Innovations Through Application-Based Systems,” *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 19, no. 4, pp. 1–12, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i4.1184.

Referensi

9. Ediyanto and M. Indriane, “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang,” J. Adm. Soc. Sci., vol. 4, no. 1, pp. 165–171, 2023, doi: 10.55606/jass.v4i1.136.
10. M. R. Q. and M. Raharso, “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES),” J. Manaj. Aset Infrastruktur Fasilitas, vol. 4, no. 1, pp. 33–42, 2020, doi: 10.12962/j26151847.v4i1.6831.
11. S. Nur Haliza and I. Fitria Agustina, “Quality Of Population Administration Services Through Online Service (Plavon) In Realizing E-Government Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Via Online (Plavon) Dalam Mewujudkan E-Government,” pp. 1–11, 2024.
12. E. Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). 2020. [Online]. Available: http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
13. M. B. Miles, M. Huberman, and J. Saldaña, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, vol. 17. 1385.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
15. Dunn, W. (1999). Indikator evaluasi kebijakan. William Dunn (1999)

Terima kasih

